

## **ARTIKEL JURNAL**

### **PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO**



Oleh

**AGUSTINI**  
**NIM. 05101241003**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Setya Raharja, M.Pd**  
NIP. 19651110 199702 1 001

**Mada Sutapa, SIP., M.Si**  
NIP. 19731008 199802 1 001

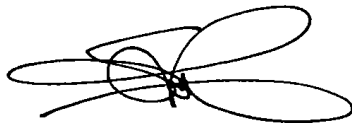
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
JANUARI 2013**

## PERSETUJUAN

Jurnal yang berjudul “PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk di-*upload*.

Yogyakarta, Januari 2013

Pembimbing I



**Drs. Setya Raharja, M.Pd**  
NIP. 19651110 199702 1 001

Pembimbing II



**Mada Sutapa, SIP., M.Si**  
NIP. 19731008 199802 1 001

# **PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

## ***THE ROLE OF SCHOOL BOARD IN MANAGING BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) AT PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL GUGUS 1 KALIKAJAR WONOSOBO DISTRICT***

Oleh: Agustini, Manajemen Pendidikan/Administrasi Pendidikan, agustini2@yahoo.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*), sebagai pendukung (*supporting*), sebagai pengontrol (*controlling*) dan sebagai penghubung (*mediator*) dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitiannya adalah Komite Sekolah dan Kepala Sekolah di SD se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena meneliti semua subjek yang ada di SD se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Sebagian besar Komite Sekolah berperan tinggi sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan sebanyak 56,31%. (2) Sebagian besar Komite Sekolah berperan sangat tinggi sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan sebanyak 79,42%. (3) Sebagian besar Komite Sekolah berperan tinggi sebagai pengontrol dalam pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan sebanyak 58,64%. (4) Sebagian besar Komite Sekolah berperan tinggi sebagai penghubung dalam pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan sebanyak 80,11% di SD Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Kata kunci: *komite sekolah, pengelolaan dana sekolah, dana BOS.*

### **Abstract**

*This study aimed to determine the role of the School Board as a conduit of consideration (advisory), as support (supporting), the controller (controlling) and liaison (mediator) in fund management School Operational Assistance (BOS) at Public Elementary School Gugus 1 Kalikajar Wonosobo District.*

*This study uses a quantitative approach to the subject of his research is the School Board and a Principal at Public Elementary School Gugus 1 Kalikajar Wonosobo District. This research examines the population because all subjects in cluster at Public Elementary School Gugus 1 Kalikajar Wonosobo District. Data*

*collection in this study using questionnaires and documentary study. The data analysis technique used is descriptive quantitative percentage.*

*The results showed the following. (1) Most of the high school Board act as a conduit of consideration in the management of BOS funds are shown as 56.31%. (2) The majority of the School Board were highly involved as a supporter in the management of BOS funds are shown as 79.42%. (3 ) Most of the high school Board acts as a controller in the management of BOS funds are shown as 58.64%. (4) Most of the high school Board acts as a liaison in the management of BOS funds are shown as 80.11% at Public Elementary School Gugus 1 Kalikajar Wonosobo District.*

*Keywords: school Board, the management of school funds, BOS funds.*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah usaha memfasilitasi peserta didik untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam ikhtiar mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Berbagai kajian maupun penelitian menunjukkan keterkaitan positif antara pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengentasan kemiskinan, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh pun menyatakan bahwa prioritas membangun sektor pendidikan adalah keniscayaan di negara-negara maju.

Untuk terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 10-11 menetapkan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan bagi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal penyempurnaan sistem pendidikan. Upaya tersebut antara

lain dengan melakukan pergeseran paradigma pengelolaan sistem pendidikan dari sentralistik ke arah desentralistik yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Masa otonomi daerah ditandai dengan implementasi UU Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dan diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai titik berat desentralisasi.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan era otonomi daerah ini adalah dengan diterapkannya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Inti dari MBS adalah pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah (Nurkholis, 2003).

Mengingat pentingnya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di sekolah, maka perlu adanya suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten dan komite sekolah di tingkat sekolah (Hasbullah, 2006). Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Perbedaan dari Komite Sekolah dan BP3 hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan (Yadi Haryadi, 2006: 57).

Ada empat peran utama komite sekolah (1) memberikan pertimbangan (*advisory agency*), (2) memberikan dukungan (*supporting agency*), (3) mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*controlling agency*), dan (4) penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa (*mediator*). Secara kelembagaan, komite sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat (Kurniawan, I., 2006).

Peran Komite Sekolah sebagai wakil dari masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk pengelolaan dana pendidikan menjadi sangat penting (Depdiknas, 2008). Salah satu contoh dana pendidikan yang perlu dikelola adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Depdiknas, 2010).

Pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah selama ini cenderung tertutup dan tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemdiknas (Hendri, 2010: 1). Salah satu indikator transparansi pengelolaan dana BOS adalah eksistensi Komite Sekolah. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan Komite Sekolah. Hal itu dimaksudkan agar ada mekanisme kontrol yang efektif dalam pemanfaatan dana tersebut. Dampak dari tidak adanya keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana BOS memungkinkan terjadinya praktik korupsi berkedok BOS. Contohnya adalah dalam bentuk penyusunan RKAS (Rahmania Utari, 2012). Hal itu bisa terlihat dalam pembahasan RKAS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang kerap tidak transparan dan tidak melibatkan Komite Sekolah. Padahal pihak sekolah seharusnya melibatkan Komite Sekolah dalam penyusunan RKAS, sehingga dalam proses perumusannya Komite Sekolah dan orangtua murid mengetahui secara jelas program-program sekolah beserta pendanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dalam penelitian ini akan menghasilkan data kuantitatif sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada (Arief Furchan 2004: 447).

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Semuanya berjumlah 8 Sekolah Dasar. Waktu penelitian ini dimulai pada Januari 2012 sampai dengan Januari 2013.

### **Target/Subjek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah komite sekolah dan kepala sekolah di Sekolah Dasar Se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari 8 kepala sekolah dan 32 Komite Sekolah Sekolah Dasar Se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

### **Prosedur**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian populasi, karena seluruh subjek penelitian dalam hal ini komite sekolah akan diteliti. Penelitian populasi bertujuan untuk meneliti peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Responden dalam penelitian ini adalah komite sekolah dan kepala sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

### **Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2008 : 148) berpendapat bahwa instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian. Berkaitan dengan instrumen penelitian, Suharsimi Arikunto (2006 : 160) menjelaskan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini angket diberikan kepada komite sekolah dan kepala sekolah sebagai responden untuk memperoleh data atau informasi mengenai peran komite sekolah yang mencakup empat peran yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*), pendukung (*supporting*), pengontrol (*controlling*), dan penghubung (*mediator*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat pilihan jawaban yaitu selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, kolom hal lain untuk memberikan keterangan bila ada informasi tambahan (Riduwan, 2009 : 28). Studi dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung dalam penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan persentase, untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang jumlahnya adalah delapan sekolah. Data yang digunakan untuk mengetahui variabel peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS pada penelitian ini diperoleh melalui instrumen yang berupa angket, jumlah butir angket adalah 21 butir. Setiap peran komite sekolah dalam



penelitian ini diungkap melalui indikator yaitu mekanisme pengambilan dana bos, mekanisme penggunaan dana bos dan pertanggung jawaban sekolah.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*) dalam pengelolaan dana BOS terdiri dari 21 butir soal. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting*) dalam pengelolaan dana BOS terdiri dari 21 butir soal. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling*) dalam pengelolaan dana BOS terdiri dari 21 butir soal. Peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*) dalam pengelolaan dana BOS terdiri dari 21 butir soal.

#### **1. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory*) dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo**

Pada peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang berperan sangat rendah 0.54%, untuk komite sekolah yang berperan rendah 21.31%, selanjutnya komite sekolah yang berperan tinggi sebesar 56.31%, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi sebesar 21.84%. Hasil tersebut menunjukkan separuh komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi, rendah dan sangat rendah hanya sebagian kecil saja.

Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan tinggi, hal ini ditunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi (56.31% dan 21.84%). Hal ini menunjukkan pada peran komite sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS cenderung tinggi.

#### **2. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*Supporting*) dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo**

Pada peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar

Kabupaten Wonosobo yang berperan sangat rendah 0.54%, untuk komite sekolah yang berperan rendah 21.31%, selanjutnya komite sekolah yang berperan tinggi sebesar 56.31%, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi sebesar 21.84%. Hasil tersebut menunjukkan separuh komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi, rendah dan sangat rendah hanya sebagian kecil saja.

Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan tinggi, hal ini ditunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi (56.31% dan 21.84%). Hal ini menunjukkan pada peran komite sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS cenderung tinggi.

### **3. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*Supporting*) dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo**

Pada peran komite sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang berperan sangat rendah 0%, untuk komite sekolah yang berperan rendah 2%, selanjutnya komite sekolah yang berperan tinggi sebesar 18.58%, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi sebesar 79.42%. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi, rendah dan sangat rendah hanya sebagian kecil saja.

Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi, hal ini ditunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi (79.42% dan 18.58%). Hal ini menunjukkan pada peran komite sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS cenderung sangat tinggi.

#### **4. Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol (*Controlling*) dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo**

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam penelitian ini, dinilai berdasarkan mekanisme pengambilan dana BOS, mekanisme penggunaan dana BOS dan pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS.

Pada peran komite sebagai pengontrol dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang berperan sangat rendah 0.33%, untuk komite sekolah yang berperan rendah 18.90%, selanjutnya komite sekolah yang berperan tinggi sebesar 58.64%, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi sebesar 35.47%. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi, rendah dan sangat rendah hanya sebagian kecil saja.

Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan tinggi, hal ini ditunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi (58.64% dan 35.47%). Hal ini menunjukkan pada peran komite sebagai pengontrol dalam pengelolaan dana BOS cenderung sangat tinggi.

#### **5. Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung (*Mediator*) dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo**

Pada peran komite sebagai penghubung dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang berperan sangat rendah 0.08%, untuk komite sekolah yang berperan rendah 19.81%, selanjutnya komite sekolah yang berperan tinggi sebesar 80.11%, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi sebesar 0%. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi,

sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dan sangat rendah hanya sebagian kecil saja.

Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan tinggi, hal ini ditunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi (80.11%). Hal ini menunjukkan pada peran komite sebagai penghubung dalam pengelolaan dana BOS cenderung tinggi.

#### **6. Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS Di Sekolah Dasar Negeri Se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo**

Secara keseluruhan peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang meliputi peran sebagai pertimbangan, peran sebagai pendukung, peran sebagai pengontrol, dapat diketahui pada peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (56.31% dan 21.84%) komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi, pada peran komite sekolah sebagai pendukung komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (79.42% dan 18.58%) komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi, untuk peran komite sekolah sebagai pengontrol komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (58.64% dan 35.47%) komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi, sedangkan pada peran komite sekolah sebagai penghubung komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (80.14%) komite sekolah berperan tinggi. Hal ini menunjukkan dari ke empat peran komite sekolah, tiga diantaranya dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah cenderung berperan tinggi, dan satu peran cenderung tinggi.

Secara keseluruhan peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS diperoleh persentase 15.51% berperan rendah, kemudian komite sekolah yang berperan tinggi 53.41%, selanjutnya komite sekolah yang berperan sangat rendah 0.24%, dan komite sekolah yang berperan sangat tinggi 34.18% . Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan

tinggi dalam pengelolaan dana BOS, yang ditunjukkan sebagian besar (53.41% dan 34.18%) komite sekolah berperan tinggi dan sangat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*), komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 56.31% (separuh) komite sekolah berperan tinggi, 21.84% (sebagian kecil) komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan yang berperan rendah 21.31% (sebagian kecil) dan sisanya berperan sangat rendah yaitu 0.54% (sebagian kecil).
2. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting*), komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 79.42% (sebagian besar) komite sekolah berperan sangat tinggi, 18.58% (sebagian kecil) komite sekolah berperan tinggi, sedangkan yang berperan rendah 2% (sebagian kecil) dan 0% yang berperan sangat rendah.
3. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling*), komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 58.64% (separuh) komite sekolah berperan tinggi, 35.47% (sebagian kecil) komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan yang berperan rendah 18.19 (sebagian kecil) dan sisanya berperan sangat rendah yaitu 0.33% (sebagian kecil).
4. Peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*), komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 80.11% (sebagian besar) komite sekolah berperan tinggi, 0% komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan yang berperan rendah 19.81% (sebagian kecil) dan 0.08% yang berperan sangat rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Furchan. (2004). *Penelitian dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Buku Panduan BOS*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasmen.
- \_\_\_\_\_. (2010a). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasmen.
- \_\_\_\_\_. (2010b). *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendri. (2010). *Korupsi Dana Pendidikan , Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS*. <http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/06/17175963/>. 1 Agustus 2012.
- Kurniawan, I. (2006). *Optimalisasi Komite Sekolah*. [http://www.pikiran\\_rakyat.com/cetak/2006/012006/27/99forumguru.htm](http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/2006/012006/27/99forumguru.htm). 16 Oktober 2006.
- Nurkholis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Rahmania Utari. (2012). *Modul Penyusunan RKAS*. [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/MODUL%20PENYUSUNAN%20RKAS\\_RAHMANIA.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/MODUL%20PENYUSUNAN%20RKAS_RAHMANIA.pdf). 1 Agustus 2012.
- Riduwan. (2009). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Saifuddin Azwar. (2004). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

*Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

*Yadi Haryadi. (2006), Pemberdayaan Komite Sekolah, Penguatan Kelembagaan  
Komite Sekolah. Jakarta : Ditjen Mandikdasmen.*